

STUDI TENTANG GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) DALAM PILKADA GUBERNUR KALTIM 2013 DI KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Rahmad Rinjani¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan perkembangan golongan putih (golput), kemudian sebab-sebab masyarakat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya/golput, serta pola-pola golput yang terjadi dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian, adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah Ketua beserta sebagian anggota PPK Kecamatan Muara Jawa dan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa yang memilih ataupun tidak memilih/Golput pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013, untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai kebutuhan penulis.

Golput selalu eksis dalam setiap pemilihan umum, hal ini dikarenakan sistem demokrasi dimana dalam sistem ini rakyat diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan khususnya dalam hal memilih kepala negara atau kepala pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa dalam setiap pelaksanaan Pilkada selalu mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian dari kedua faktor penyebab golput tersebut, maka dapat diketahui pula pola-pola golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa. Pola-pola golput yang ada di Kecamatan Muara Jawa dapat dikelompokkan menjadi 3 yakni, pola politis, pola ideologis, dan pola pragmatis. Dari penyebab dan pola-pola golput inilah dapat terlihat apa yang membuat masyarakat tidak ikut memilih /golput dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa.

Kata Kunci : *golput, pilkada gubernur, Muara Jawa, Kalimantan Timur..*

Pendahuluan

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter.. Setelah

¹ Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rrinjani23@gmail.com

beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini .

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2005. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat amandemen undang-undang 1945. Undang-Undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi (Abdullah, 2005:4-5).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia pertama kali diadakan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah 8 tahun berjalan di Indonesia menyimpan banyak persoalan. Disamping makin tajamnya konflik horisontal antar pendukung calon, juga makin rendahnya partisipasi masyarakat yang diindikasikan oleh tingginya angka Golongan Putih (Golput).

Golongan Putih (Golput) adalah golongan yang secara sadar menyatakan dirinya untuk tidak memilih. Fenomena golongan putih (Golput) adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan penyelenggaraan proses pemilihan umum di Indonesia.

Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Timur 2013 telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2013 untuk memilih Gubernur Kalimantan Timur periode 2013–2018. Pada pemilihan kali ini lagi-lagi tren golongan putih alias golput melanda pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang berlangsung, Selasa 10 September 2013 silam.

Dalam penelitian ini, pemilih memilih lokasi di Kecamatan Muara Jawa. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Kecamatan Muara Jawa dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Gubernur Tahun 2013 ini menurun, dengan menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat itu berarti disisi lain mengindikasikan naiknya angka golongan putih (golput).

Dengan kembali meningkatnya angka golput yang terjadi dalam Pilkada Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa dari 39% pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tahun 2010 menjadi 45% pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2013 merupakan sebuah indikasi apatisme politik yang mengejutkan, bahkan ini merupakan golput terbesar yang pernah terjadi di Kecamatan Muara Jawa selama dilaksanakannya Pilkada secara langsung. Dari fenomena-fenomena golput yang terjadi tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang tren golput yang mengalami peningkatan pada Pilkada Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan golongan putih (golput) yang terjadi dalam Pilkada di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ?
2. Apa yang menyebabkan masyarakat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya/golput dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ?
3. Bagaimana pola-pola golput yang terjadi dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ?

Kemudian dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan golongan putih (golput) yang terjadi dalam Pilkada di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, dan untuk mengetahui sebab-sebab serta pola-pola golput yang terjadi dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), maupun partai politik agar senantiasa memberikan pendidikan politik, sosialisasi politik, perbaikan-perbaikan, masukan khususnya yang terjadi di kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga penyebab meningkatnya angka golput dapat di atasi. Serta dapat memberikan sumbangan saran-saran terhadap aparaturnya untuk meminimalkan angka Golongan Putih (GOLPUT) dalam Pilkada-Pilkada berikutnya di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kerangka Dasar Teori

Pemilihan Umum (PEMILU)

Menurut Andrew Reynold dalam Basri (2011:125) Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya terdapat suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil rakyat yang akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan Negara.

Jenis jenis pemilu di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Kemudian pemilu menurut tingkatannya di Indonesia juga dibagi menjadi dua bagian yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. Proses pemilu di Indonesia juga dibagi menjadi dua yakni Pemilu langsung dan pemilu tidak langsung.

Pemilihan Kepala Daerah

Kepala daerah sendiri menurut Widjaja (2002:39) adalah Gubernur (kepala daerah Provinsi), Bupati (kepala daerah Kabupaten), atau Walikota (kepala daerah kota).

Menurut PP No. 6 tahun 2005, Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pilkada Gubernur merupakan sebuah pemilihan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010.

Partisipasi Politik

Menurut Seta Basri (2011:97) Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Berbeda pula dengan Budiardjo (2009:367) yang mendefinisikan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

Jadi pemahaman partisipasi politik secara kontekstual memiliki arti keikutsertaan, didalam konteks politik hal ini mengacu kepada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Golongan Putih (GOLPUT)

Menurut Badri Khaeruman (2004:69) Golongan Putih (Golput) adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya di dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Atau sering pula didefinisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu.

Sedangkan Muhibin (Wahid, 2009:73) mengatakan bahwa Golongan Putih atau (Golput) dalam bahasa politik adalah suatu sikap yang diambil oleh individu-individu ataupun kelompok untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

Selanjutnya Eep Saifullah Fatah (Wahid, 2009:71) membagi golput menjadi empat macam, yaitu, golput teknis, golput teknis-politis, golput politis dan golput ideologis.

Kemudian ada Agus Riewanto (Wahid, 2009:89) yang membagi tipologi golput menjadi tiga, yaitu golput ideologis, politik dan pragmatis.

Golongan Putih (GOLPUT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Golongan Putih (golput) adalah suatu hal yang selalu ada di dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi atau yang sering di sebut dengan Pemilihan Umum (pemilu).

Golput mencerminkan tidak adanya partisipasi rakyat terhadap kehidupan negara. Masyarakat mulai apatis dengan kehidupan bersama dalam masyarakat. Golput dalam setiap pelaksanaan pemilu semakin besar. Hal ini dapat terlihat dari data-data dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) tingkat Provinsi dan Kabupaten yang mencapai angka 40%.

Begitu pula yang terjadi pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa pada 10 september lalu. Dimana terjadi perkembangan golput dari pemilu sebelumnya, yakni pada Pilbup Tahun 2010, ketika itu angka golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa adalah 39,80%, sedangkan pada Pilgub Tahun 2013 lalu angka golput di Kecamatan Muara Jawa adalah 45%, sehingga angka golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa mengalami kenaikan hampir 6%. Dari perkembangan golput tersebut maka akan timbul pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang menyebabkan masyarakat memilih tidak mau ikut berpartisipasi dalam pemilihan tersebut.

Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan masyarakat di Kaltim tidak menggunakan hak pilihnya/golput, yakni dari segi faktor administrasi. Kemudian dari faktor Sosial, Ekonomi, Politik dan Budaya.

Dari sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya golput tersebut, maka muncul pola-pola dari golput yang terjadi dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa. Melihat dari sebab-sebab golput yang ada maka bisa lihat bahwa jenis dari pola-pola golput yang terjadi pada Pilgub di Kecamatan Muara Jawa terbagi menjadi tiga kategori yakni ideologis, politis dan pragmatis.

Metode Penelitian

Artikel ini memakai data-data dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Kecamatan Muara Jawa dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai Golongan Putih (GOLPUT) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Perkembangan Golongan Putih (Golput) Yang Terjadi Dalam Pilkada di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Golput atau sering disebut dengan gerakan *non-voter* selalu menghiasi panggung pemilihan di Indonesia. Muhibin (Wahid, 2009:73) mengatakan bahwa Golongan Putih (Golput) dalam bahasa politik adalah suatu sikap yang diambil oleh individu-individu ataupun kelompok untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan. Atau dalam politik Indonesia golput adalah orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakilnya di pemerintahan, termasuk pemimpin tertinggi seperti Presiden.

Muara Jawa merupakan salah satu kecamatan yang terletak di daerah pesisir pantai di Kabupaten Kutai Kartanegara. Di Kecamatan Muara Jawa tingkat *non-voter* atau golputnya dalam pelaksanaan Pemilu sangat tinggi khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) selalu mengalami kenaikan. Dari data yang ada rata-rata angka golput di Kecamatan Muara Jawa berada dikisaran angka 35%, dimana pada Pilkada Bupati tahun 2005 golputnya berjumlah 29%, lalu pada Pilkada Gubernur tahun 2008 angka golput di Kecamatan Muara Jawa sebesar 36%, kemudian pada Pilkada Bupati tahun 2010 golputnya naik sebesar 3% menjadi 39%, dan yang terakhir pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 angka golputnya kembali naik sebesar 6% yakni mencapai angka 45%. Golput tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan Pilkada yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa sejak awal bergulirnya pemilihan langsung tahun 2005.

Sebab-Sebab Golput Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Golput atau gerakan *non-voter* dilatarbelakangi oleh beberapa hal, begitu pula dengan golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa. Salah satunya adalah karena persoalan administratif dimana banyak pemilih yang sesungguhnya mempunyai niat baik dan keinginan untuk memilih tetapi gagal karena terhalang oleh persoalan administratif. Kedua, pemilih tidak datang ke TPS karena kuatnya persoalan individual yang dihadapi ketika hari H pelaksanaan Pilkada tersebut. Sebagian pemilih yang memiliki keinginan untuk memilih dan secara prosedural memiliki persyaratan administratif, namun tetap tidak bisa memilih karena persoalan teknis individual. Ketiga, yang melatar belakangi pemilih untuk golput ini adalah karena faktor kesadaran politik.

Penyebab golput yang ada di Kecamatan Muara Jawa sangat bervariasi, tetapi bisa dikelompokkan menjadi dua sebab yakni internal dan eksternal. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikannya dalam bentuk tabel tentang penyebab golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Faktor Penyebab Golput Pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di
Kecamatan Muara Jawa

No	Faktor Penyebab Golput	Jenis-Jenis Golput
1	Faktor Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Teknis : telat bangun, malas, dll. - Ekonomi : lebih baik mencari uang. - Tak percaya pada calon. - Tak melihat pentingnya pemilu. - Rasionalisme terbatas
2	Faktor Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> - Teknis : tidak terdaftar. - Ideologi atau paham tertentu. - Cuaca. - Letak TPS Jauh. - Dll

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa dapat dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi kesalahan teknis dari diri sendiri seperti malas, telat bangun, ada keperluan mendadak dan lain-lain. Selain itu faktor internal lain yang menyebabkan banyaknya golput tersebut adalah tidak percaya lagi masyarakat terhadap calon-calon yang ada, kemudian masyarakat tidak melihat akan pentingnya pemilu bagi mereka serta rasionalisme terbatas.

Kemudian faktor eksternal penyebab golput yang dimaksud disini meliputi kesalahan-kesalahan teknis dari petugas pelaksana baik itu KPU, PPK, PPS maupun KPPS. Seperti masih banyak warga masyarakat yang tidak terdaftar atau terdaftar ganda, selanjutnya adanya warga yang sudah tidak berada di daerah tersebut tetapi masih ada dalam daftar pemilih tetap. Selain kendala teknis dari KPU penyebab lain yang menyebabkan golput karena faktor eksternal adalah adanya para penganut ideologi atau paham-paham tertentu yang bertentangan dengan kondisi serta sistem pemilu yang ada saat ini, sehingga mereka tidak ingin menggunakan hak pilih mereka dengan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Alasan lainnya adalah letak atau lokasi tempat pemilihan atau TPS yang berada jauh dari wilayah tempat tinggal masyarakat yang bersangkutan serta karena kendala cuaca seperti turun hujan ada saat pemilihan berlangsung juga menjadi penyebab golput yang didasari oleh faktor eksternal.

Pola-Pola Golput Yang Terjadi Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pola-pola golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa sangat beragam, itu terlihat dari banyaknya sebab-sebab yang mengakibatkan masyarakat Muara Jawa tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan atau golput yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada Gubernur Kaltim 2013 yang lalu. Dari sana bisa kita lihat

betapa bervariasi sikap atau alasan yang di ambil oleh masyarakat untuk tidak ikut memilih dalam Pilkada tersebut.

Pola/bentuk golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa ini dapat dikerucutkan menjadi 3 pola melihat dari segi alasan-alasan yang diambil oleh masyarakat ketika tidak ikut memilih atau golput pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013, ketiga pola tersebut adalah politis, ideologis dan pragmatis.

Pola Golput Politis

Pola golput politis merupakan salah satu pola golput yang terjadi pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa. Pola golput politis yang diambil oleh masyarakat Kecamatan Muara Jawa ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pelaksana serta tim sukses dari semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dimana tidak adanya kampanye-kampanye yang dilakukan membuat masyarakat kurang mengenal pasangan calon-calon gubernur dan wakil gubernur yang ada.

Akibatnya masyarakat menjadi tidak mempunyai pilihan dalam pemilihan gubernur yang lalu, selain itu juga dari pasangan-pasangan calon yang ada masih didominasi oleh orang-orang lama, sehingga masyarakat di Kecamatan Muara Jawa cenderung malas untuk menggunakan hak pilih mereka ketika diadakan pemilu, baik itu Pilkada, Pileg maupun Pilpres.

Masyarakat menganggap bahwa tidak ada keuntungan-keuntungan yang mereka dapat dari pemilihan tersebut, ini juga membuat masyarakat menjadi jera terhadap calon-calon yang ada setiap diadakannya pemilu-pemilu, karena mereka telah beranggapan kalau semua calon pasti hanya akan mengumbar janji-janji saja namun tidak ada bukti real yang diberikan. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah agar bisa memberikan solusi untuk bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkompeten dan bukan yang hanya bisa memberikan janji saja.

Pola Golput Ideologis

Pola golput ideologis adalah pola golput dimana masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan sistem pemilu yang ada, dengan berkaca pada ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu tersebutlah membuat masyarakat menjadi malas untuk ikut berpartisipasi terhadap pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah ini, sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi golput seperti yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa.

Pola golput ideologis yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Muara Jawa terjadi sebagai bentuk protes serta kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada, sehingga masyarakat menuntut sebuah perbaikan didalam sistem pemilu yang ada agar nantinya bisa menciptakan sebuah sistem pemilu yang benar-benar bisa menciptakan sebuah perubahan bagi daerah serta mampu menciptakan seorang pemimpin yang benar-benar bisa memberikan kesejahteraan

Pola Golput Pragmatis

pola golput pragmatis ini menunjukkan bahwa inilah yang menjadi sebuah pondasi kuat dari masyarakat di Kecamatan Muara Jawa dalam mengambil sikap golput dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur Kaltim 2013. Dimana kinerja kurang baik yang ditunjukkan oleh pemerintahan yang ada saat ini masih jauh dari yang diharap-harapkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat di Kecamatan Muara Jawa beranggapan bahwa pemilu yang dilakukan khususnya pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013, tidak akan mengubah keadaan mereka serta tidak memberikan manfaat yang berarti untuk kehidupan mereka khususnya dari segi ekonomi dan mereka menggunakan haknya dengan sebuah pertimbangan yang sangat detail dan ini mengarahkan pada sebuah sikap pola yang berbentuk pragmatis.

Kegagalan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin yang ada juga mengacu terjadinya sikap golput yang ada di Kecamatan Muara Jawa ini. Dari situlah masyarakat mulai mengkalkulasikan pilihan mereka secara rasional, sehingga pada setiap dilaksanakannya pemilihan kepala daerah masyarakat mulai memilah-milah apakah dengan memilih mereka akan mendapatkan manfaat dan apakah dengan pemilihan ini dapat mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik terutama dari segi ekonomi. Inilah yang menjadi dasar utama sikap pola golput pragmatis yang diambil oleh masyarakat di Kecamatan Muara Jawa dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 yang lalu.

Jadi secara garis besar pola golput yang terjadi dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa ada 3 yaitu pola golput politis, ideologis dan pragmatis. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikannya dalam bentuk tabel tentang pola-pola golput yang terjadi pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pola-Pola Golput Pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa

No	Pola-Pola Golput	Jenis-Jenis
1	Pola Golput Politis	<ul style="list-style-type: none">- tidak mempunyai pilihan dari kandidat yang tersedia,- tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan dan perbaikan.
2	Pola Golput Ideologis	<ul style="list-style-type: none">- tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal),- tidak mau terlibat didalam pemilihan entah karena alasan fundamentalisme agama

		maupun alasan politik-ideologi
3	Pola Golput Pragmatis	<ul style="list-style-type: none"> - berdasarkan kalkulasi rasional bahwa aktivitas memilih tidak akan berdampak lebih baik pada diri pemilih, - tidak memberi manfaat, - tidak mengubah keadaan pemilih.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 3 pola golput yang terjadi pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa, pola-pola tersebut adalah pola golput politis, ideologis dan pola golput pragmatis. Pola golput politis adalah pola golput yang terjadi karena masyarakat malas terlibat dan tidak percaya lagi dengan sistem pemilu yang ada. Kemudian pola golput ideologis adalah pola golput yang diambil karena masyarakat tidak memiliki pilihan serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon yang ada. Dan yang terakhir pola golput pragmatis adalah pola golput yang dikarenakan keyakinan masyarakat tentang pemilu yang tidak akan mengubah keadaan dan memberikan manfaat bagi mereka.

Semua pola golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa masing-masing mengarah pada sebuah sikap kekecewaan yang coba ditunjukkan oleh masyarakat akan kinerja-kinerja para pemimpin yang ada di Kaltim. Seharusnya kekecewaan seperti ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi pihak-pihak pemerintah untuk bisa menyikapi berbagai bentuk dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja-kinerja pemimpin-pemimpin yang ada.

Kesimpulan

1. Golongan Putih (GOLPUT) atau gerakan non-voter yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa pada setiap pelaksanaan Pilkada selalu mengalami peningkatan dari Pilbup 2005 angka golputnya 29%, Pilgub 2008 36%, kemudian Pilbup 2010 39%, dan pada Pilkada Gubernur 2013 kemarin golputnya mencapai 45%. Perkembangan golput ini terjadi akibat partisipasi masyarakat di Kecamatan Muara Jawa sangat rendah sekali terhadap ajang pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pilkada yang diberikan oleh petugas pemilihan seperti KPU, PPK, PPS, KPPS dll. Kemudian masyarakat juga jenuh dengan pasangan calon yang masih mengusung nama-nama lama, karena masyarakat mengharapkan adanya regenerasi pemimpin baru yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Sehingga mereka menjadi bosan dan malas untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan-pemilihan yang ada.
2. Sebab-sebab golput yang terjadi di Kecamatan Muara Jawa pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 bisa dikelompokkan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah golput yang disebabkan karena alasan teknis seperti telat bangun, malas dll, dari segi ekonomi dimana lebih mementingkan pekerjaan, kemudian tidak percaya terhadap calon-calon yang

ada, tidak melihat akan pentingnya dari sebuah pelaksanaan pemilu serta rasionalisme terbatas. Sedangkan faktor eksternal yakni golput karena berbagai kesalahan-kesalahan teknis yang dilakukan oleh KPU seperti tidak terdaftar atau terdaftar ganda, kemudian karena ideologi atau paham tertentu, karena cuaca, lokasi TPS jauh dll.

3. Pola-pola golput pada Pilkada Gubernur Kaltim 2013 di Kecamatan Muara Jawa ada tiga yaitu politis, ideologi dan pragmatis. Pola golput politis adalah bentuk golput yang terjadi karena tidak adanya pilihan yang dimiliki oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi serta kampanye yang dilakukan. Kemudian tidak percayanya masyarakat kepada kandidat/calon yang ada bisa membawa perubahan dan perbaikan untuk masyarakat Muara Jawa. Pola golput ideologis yakni dimana masyarakat tidak ingin terlibat dalam pemilihan serta sudah tidak percaya dengan sistem pemilu yang ada. Pola golput pragmatis dimana pola golput tersebut terjadi atas kalkulasi rasional berdasarkan informasi yang didapat tentang track record dari pasangan calon, sehingga disini masyarakat memilih dengan berbagai perhitungan yang tidak jarang mereka memilih golput karena beranggapan bahwa pilkada tidak akan merubah keadaan serta tidak memberi manfaat terutama dari segi ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Muara Jawa.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- _____. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Arifin, Anwar. *Pencitraan Dalam Politik (Strategi Pemenangan Pemilu Dalam Perspektif Komunikasi Politik)*. Jakarta: Pustaka Indonesia, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asfar, Muhammad. *Presiden Golput*. Surabaya: Jawa Pos Press, 2004.
- Basri, Seta. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner., 2011.
- Budiman, Arief. *"GOLPUT" dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 6*. Jakarta : PT. Delta Pamungkas, 2004.
- _____. *Kebebasan, Negara, Pembangunan, Kumpulan Tulisan 1965-2005*. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute, 2006.
- Khaeruman, Badri, dkk. *Islam dan Demokrasi Mengungkap Fenomena Golput*. Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004.
- Moleong, J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Remaja*. Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rahman, A. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Rochajat, Harun dan Sumarno AP. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Mandar maju, 2006.

- Rudy, Teuku May. *Pengantar Ilmu Politik: Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Saifuddin, Azwar. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2010.
- Sanit, Arbi. *Golput: Aneka Pandangan dan Fenomena Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Sarundajang, S.H. 2002. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sidarta. *Strategi Pemenangan dalam Pemilihan Langsung*. Ciputat: Kalam Pustaka, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Sumanto, Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Supriyanto, Topo Santoso dan Didik. *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- _____. *Pilkada, Pilkada Langsung dan Masa Depan Otoda*. Dalam Jurnal Ilmu Politik AIPI, 2006.
- Urbaningrum, Anas. *Pemilu Orang Biasa: Pubik Bertanya Anas Menjawab*. Jakarta: Republika, 2004.
- Wahid, Abdurrahman dan Halim HD dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput*. Jakarta: Sagon, 2009.
- Widjaja H. A. W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Internet

- <http://www.antaranews.com/berita/395423/golput-di-pilgub-kaltim-capai-45-persen>. diakses pada tanggal 29-01-2014 .
- <http://cekhitasaka.blogspot.com/2009/05/teori-kontrak-dan-munculnya-golongan.html>. di akses pada tanggal 23-12-2013.
- <http://harrytyajaya.blogspot.com/2009/12/gubernur-bupati-dan-walikota-menurut.html> . diakses pada tanggal 23-02-2014.
- [http://www.jpnn.com/read/2013/09/10/190297/Pilkada-Kaltim,-Suara Terbanyak-Golput](http://www.jpnn.com/read/2013/09/10/190297/Pilkada-Kaltim,-Suara%20Terbanyak-Golput)- diakses pada tanggal 29-01-2014.
- <http://milatinasmp2blitar.blogspot.com/pemilu-langsung-dan-pemilu-tidak-langsung.html>. diakses pada tanggal 22-02-2014.
- <http://pengertianadalahdefinisi.blogspot.com/2013/12/makalah-pemilu-tujuan-jenis-sistem-dan.html>-diakses pada tanggal 17-02-2014.
- <http://www.solopos.com/2014/02/04/gagasan-pemilu-nasional-dan-pemilu-lokal-486960>-diakses pada tanggal 19-02-2014.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur> -diakses pada tanggal 23-02-2014.

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta:
Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Jakarta:
Sekretariat Negara.